



RENCANA KERJA 2026

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH





GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR: 000-7.2/251/Bappada-9.51/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c angka 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ... 6 oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

1. Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Renja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Renja Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Renja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
16. Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah;
17. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah;
20. Renja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

22. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah;
23. Renja Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
24. Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah;
27. Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
29. Renja Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah;
30. Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
31. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
32. Renja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
33. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
34. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
35. Renja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
36. Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
37. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah;
38. Renja Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah;
39. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
40. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2026.

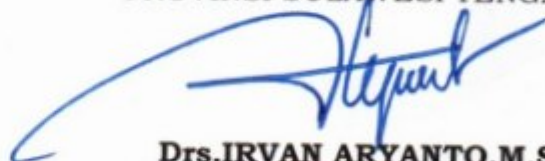
Rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

Rencana Kerja ini semoga bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan.

Palu, 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19730321 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang | 7 |
| 1.2 Landasan Hukum | 8 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 11 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

| | |
|---|----|
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja | 15 |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD | 21 |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 22 |
| 2.4 Review Tahapan Rancangan Awal RKPD | 28 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 55 |

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

| | |
|---|----|
| 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional | 57 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 57 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 58 |

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

| | |
|-------|----|
| | 75 |
|-------|----|

BAB V : PENUTUP

| | |
|-------|----|
| | 78 |
|-------|----|

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan merupakan salah satu prioritas Pembangunan Nasional yang perlu tindakan nyata dalam langkah-langkah operasional dari seluruh komponen bangsa dan perlu dilaksanakan secara terus-menerus dari seluruh tingkatan wilayah, dari tingkat nasional hingga di tingkat desa. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa walaupun penanganan bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan telah banyak memperoleh berbagai kemajuan dan peningkatan dalam pembangunan, namun demikian upaya tersebut dirasakan masih perlu dilanjutkan dan terus lebih dikembangkan serta dimantapkan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai wujud implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD). Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pengusulan pendanaan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;

15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 163);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Desain Olahraga (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 955).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

✓ MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD yang operasional untuk jangka waktu/ periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) SKPD digunakan untuk penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, RKPD Provinsi selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

✓ TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah untuk satu tahun yaitu tahun 2026, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan penjelasan yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian tentang Rencana Kerja (RENJA) SKPD, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD serta susunan garis besar ini dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara ringkas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, Pengukuran Capaian Kinerja Tahun sebelumnya dan Analisis Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting terkait penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang rencanan pelaksanaan program dan kegiatan serta pendanaan indukatif target kinerja, juga hasil (outcame) yang akan di capai berdasarkan rencana strategis (Renstra) Tahun 2026.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh terkait dengan penyusunan rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah n-2 (tahun 2023) lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), megacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan realisasi RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah atau realisasi APBD untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Didasarkan pada pencapaian output (keluaran) dari masing-masing kegiatan yang selanjutnya digunakan untuk melihat pencapaian sasaran program. Hasil evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 yang bersumber dari APBD memperlihatkan bahwa pencapaian kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh hasil yang memuaskan, pencapaiannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama OPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2025) | Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) Tahun 2023 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6) | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 | |
|------|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja tahun (n-2) | Realisasi Perangkat Daerah tahun (n-2) tahun 2024 | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | | Indikator | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 2 | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan Olahraga | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | 91,46 | 64 | 66 | 45 | 68 | 91,46 | 55 | 60,14 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 74 | 80 | 70 | 87 | 95,00 | 75 | 78,95 |
| 2 | 19 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | 5 | 71,43 |
| 2 | 19 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 74 | 80 | 70 | 87 | 80 | 75 | 93,75 |
| 2 | 19 | 0 | | | | | | | | |
| | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0,75 | 75,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------|----|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|-------|------|-----|-------|-------|-------|
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan kurisasi SKPD | Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD | Dokumen | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 12 | 9.00 | 75.00 |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen Laporan Keuangan | Dokumen | | | | | | | | | | | | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | - | - | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | Indeks Tasa Kelola PU Perangkat Daerah | Persen | | | | | | | | | | | | 74 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 75 | 75.00 |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.03 | 02 | Pengamanan Barang milik Daerah SKPD | Laporan Jumlah BMD Perangkat Daerah | Laporan | | | | | | | | | | | | 1 | 1.00 | 1.00 | 100 | - | - | | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.03 | 04 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan Jumlah BMD Perangkat Daerah | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1.3 | 62.50 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.04 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | | | | | | | | | | | | 78 | 78.00 | 78.00 | 100 | 78 | 78 | 50.00 | 64.10 |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.04 | 05 | Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Pegawai yang meningkatkan kinerjanya | dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.75 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah laporan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Orang/ASN | | | | | | | | | | | | 6 | 8.00 | 8.00 | 100 | 1 | 50.00 | 64.10 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.05 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | | | | | | | | | | | | 78 | 78.00 | 78.00 | 100 | 100 | 75 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.05 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket pengadaan alat dan kelengkapan kantor | Bulan | | | | | | | | | | | | 12 | 12.00 | 12.00 | 100 | 12 | 15.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.05 | 09 | Penyenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya penunjang pegawai | Keg | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 75.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.06 | | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | Persen | | | | | | | | | | | | 78 | 78 | 78 | 100 | 100 | 0.75 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.06 | 01 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya penunjang pegawai | unit | | | | | | | | | | | | 21 | 20 | 15 | 75 | 1 | 40.00 | 51.28 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.07 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Persen | | | | | | | | | | | | 78 | 78 | 60.00 | 77 | 77 | 9.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.07 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 6.00 | 50 | | 9.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.07 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Paket Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | | | | | | | | | | | | 12 | 12.00 | 12.00 | 100 | | 9.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 1 | 1.09 | | Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Realisasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Unit | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0.75 | 75 | | 0.75 | 75.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|------|----|--|---|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|-------|-----|--|--|--|--|-------|--------|-------|
| 2 | 19 | 0 | 2 | 1.01 | 02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Wirasaha Muda Provinsi | Jumlah Wirasaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang di tingkarkan Kapasitas daya Salingnya | | | | | | | | | | | | 20 | 20.00 | 40.00 | 200 | | | | | | 0.75 | 3.75 |
| 2 | 19 | 0 | 2 | 1.02 | | Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 75.00 | 75 | | | | | | 60.00 | 60.00 |
| 2 | 19 | 0 | 2 | 1.02 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | | | | | | | | | | | | | 30.00 | 25.00 | 83 | | | | | | 15.00 | 50.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 3 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | Orang | 4.40 | | | | | | | | | | 15.00 | 10.00 | 66 | | | | | | 4.40 | 3.75 | 85.23 |
| | | | | | | | Jumlah Atlet Berprestasi | Orang | 12 | | | | | | | | | | 12.00 | 10.00 | 83 | | | | | | 12 | 8.00 | 66.67 |
| | | | | | | | Gelanganq/ balai remaja (selain milik swasta) | Gelanganq | 20 | | | | | | | | | | 20.00 | 15.00 | 75 | | | | | | 20 | 9.00 | 45.00 |
| 2 | 19 | 0 | 3 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase jumlah atlet yang dibina dan ketersediaan sarana prasarana olahraga | | | | | | | | | | | | 100.00 | 50.00 | 50 | | | | | | 30.00 | 85.01 | |
| 2 | 19 | 0 | 3 | 1.01 | 03 | Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | | | | | | | | | 20.00 | 10.00 | 50 | | | | | | 15.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 3 | 1.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | Persentase jumlah even dan prestasi atlet | | | | | | | | | | | | 100.00 | 75.00 | 75 | | | | | | 15.00 | 75.00 | |
| 2 | 19 | 0 | 3 | 1.02 | 01 | Keikutsertaan Anggota kontingen Provinsi dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | 40.00 | 413.22 | |
| 2 | 19 | 0 | 3 | 1.02 | 03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan dalam multi event dan single event | Jumlah Peserta yang berprestasi dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event | | | | | | | | | | | | 25.00 | 15.00 | 60 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|---|------|----|--|--|--------|------|--|--------|-------|-----|--|--|--|--|--|-------|
| 2 | 19 | 0 | 1.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Persentase Jumlah pembinaan atlet berprestasi | | | | 100.00 | 50.00 | 50 | | | | | | |
| 2 | 19 | 0 | 1.03 | 03 | Penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi | Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan memanfaatkan | | | | 1.00 | 1.00 | 100 | | | | | | |
| 2 | 19 | 0 | 1.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Persentase pembinaan organisasi/cabang Olahraga yang dibina | | | | 100.00 | 75.00 | 75 | | | | | | 36.00 |
| 2 | 19 | 0 | 1.04 | 01 | Standarisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | 62 |
| 2 | 19 | 0 | 1.04 | 03 | Peringatan kerjasama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peringatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan lembaga terkait | | | | 1 | 1 | 100 | | | | | | 75.00 |
| 2 | 19 | 0 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | Persentase organisasi kepramukaan yang aktif | Persen | 0.39 | | 100 | 100 | 100 | | | | | | 75.00 |
| 2 | 19 | 0 | 1.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | Capaian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan | | | | 100.00 | 50.00 | 50 | | | | | | 91.46 |
| 2 | 19 | 0 | 1.01 | 03 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi | Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang meningkatkan kapasitasnya | | | | 35.00 | 25.00 | 71 | | | | | | 75.00 |

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026. Analisis Kinerja Pelayanan dapat digambarkan pada tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel T.C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH

| NO | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|------------------------|---|--------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Thn 2024 (thn n-2) | Thn 2025 (n-1) | Thn 2026 (thn n) | Thn 2027 (thn n+1) | Thn 2024 thn n-2) | Thn 2025 (thn n-1) | Thn 2026 (thn n) | Thn 2027 (thn n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Indeks Pembangunan Pemuda | | Indeks Pembangunan Pemuda | 60.00 | 61.15 | 62.26 | 62.89 | Belum Rilis dari Kemendpora RI | Tahap Pelaksanaan | 62.26 | 62.89 | - |
| 2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan | | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi | 2.53 | 4.53 | 6.53 | 8.53 | | | 6.53 | 8.53 | - |
| | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | | Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) | 0.408 | 0.433 | 0.458 | 0.483 | 0.403 | Tahap Pelaksanaan | 0.458 | 0.483 | |
| | Dimensi Ruang Terbuka IPO | | Dimensi Ruang Terbuka IPO | | | 0.842 | 0.867 | | | 0.842 | 0.867 | |
| | Dimensi Ekonomi IPO | | Dimensi Ekonomi IPO | | | 0.826 | 0.851 | | | 0.826 | 0.851 | |
| | Dimensi SDM IPO | | Dimensi SDM | | | 0.088 | 0.113 | | | 0.088 | 0.113 | |
| | Dimensi Partisipasi IPO | | Dimensi Partisipasi IPO | | | 0.326 | 0.351 | | | 0.326 | 0.351 | |
| | Dimensi Performa IPO | | Dimensi Performa IPO | | | 0.098 | 0.123 | | | 0.098 | 0.123 | |
| | Dimensi Kebugaran Jasmani IPO | | Dimensi Kebugaran Jasmani IPO | | | 0.229 | 0.254 | | | 0.229 | 0.254 | |
| | Dimensi Kesehatan IPO | | Dimensi Kesehatan IPO | | | 0.471 | 0.496 | | | 0.471 | 0.496 | |
| | Dimensi Perkembangan Personal IPO | | Dimensi Perkembangan Personal IPO | | | 0.585 | 0.610 | | | 0.585 | 0.610 | |
| | Dimensi Literasi Fisik IPO | | Dimensi Literasi Fisik IPO | | | 0.658 | 0.683 | | | 0.658 | 0.683 | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah:

- 1) Urusan Pemuda, pelayanan kepemudaan belum optimalnya program kegiatan mengingat banyaknya jumlah pemuda dengan berbagai permasalahan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat tertangani secara optimal. Hal ini disebabkan:
 - ✓ Keterbatasan program tindak lanjut bagi pemberdayaan dan pengembangan pemuda terampil
 - ✓ Terbatasnya kuantitas kesadaran pemuda
 - ✓ Terbatasnya kegiatan penyadaran kepemudaan yang berkelanjutan
 - ✓ Terbatasnya kegiatan penguatan organisasi kepemudaan
 - ✓ Terbatasnya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan
 - ✓ Terbatasnya kegiatan pengembangan pemuda
 - ✓ Terbatasnya pembimbingan dan pendampingan terhadap alumni program kewirausahaan
 - ✓ Terbatasnya jumlah kegiatan bila dibandingkan dengan jumlah pemuda dan luasnya cakupan wilayah pembinaan
 - ✓ Terbatasnya program peninjauan dan pelatihan peningkatan SDM kepemudaan sebagai pendamping dan perpanjangan tangan di Kab/Kota.

- ✓ Kegiatan kepemudaan belum dirasakan menyentuh kepada pemuda di kecamatan/desa
 - ✓ Terbatasnya prasarana Gedung Kepemudaan membuat aktivitas pemuda belum terakomodir melalui kegiatan/kreativitas pembinaan dalam ruang.
 - ✓ Prestasi Pemuda Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang khususnya pada keikutsertaan kegiatan pemuda tingkat provinsi dan nasional.
- 2) Urusan Keolahragaan, Pelayanan keolahragaan terus mengalami peningkatan, tetapi masih didominasi kegiatan penyelenggaraan-penyelenggaraan/event olahraga. Pada kegiatan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi beberapa kegiatan telah dapat diikuti oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah dengan cukup berprestasi. Hal ini disebabkan:
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
 - ✓ Terbatasnya kompetisi/ Festival olahraga tingkat Provinsi
 - ✓ Terbatasnya pelatihan peningkatan SDM tenaga keolahragaan
 - ✓ Terbatasnya teknologi indentifikasi dini terhadap penetapan cabang olahraga bagi calon atlit
 - ✓ Terbatasnya penghargaan terhadap tenaga keolahragaan
 - ✓ Terbatasnya kompetensi yang diikuti cabang olahraga tingkat regional dan nasional.

2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi utama perumusan kebijakan, teknis urusan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, kemitraan, sarana dan prasarana, menyelenggarakan urusan olahraga dan pemuda, pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda, pengkoordinasian. Terdapat permasalahan yang dapat di identifikasikan berdasarkan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tabel II.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|--|
| 1 | Masih lemahnya kapasitas kepemudahan | <p>a. Belum tersedianya data terpadu kepemudahan yang memadai dan terintegrasi baik pusat dan daerah yang mudah diakses dan valid;</p> <p>b. Belum memiliki system informasi kepemudahan berbasis IT;</p> <p>c. Belum optimalnya peran Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) dan anggaran kepemudahan yang terbatas;</p> | <p>- Tidak adanya data terpilah keterkaitan dengan kepemudahan di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>- Base data yang tidak terintegrasi diseluruh wilayah.</p> <p>- Tidak adanya program yang dibentuk untuk mendorong pihak industri menjadi mitra bagi pemuda</p> |
| 2 | Belum Optimalnya pengembangan Keolahragaan | <p>a. Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah Terkait dan Kab/Kota serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pembudayaan olahraga;</p> <p>b. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi</p> | <p>- Belum Terbentuknya tim Koordinasi melibatkan stakeholder terkait (pihak swasta) dalam peningkatan pengembangan industri olahraga.</p> <p>- Masih terbatas pelaksanaan pengembangan sarana prasarana olahraga sesuai peruntukannya.</p> <p>- Belum optimalnya pelatihan dan pengembangan kapasitas pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi.</p> |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|--|
| | | <p>program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih, instruktur, wasit, juri, fisioterapi, dokter dan ahli gizi;</p> <p>d. Belum adanya mekanisme pengumpulan data dan pemetaan potensi olahraga daerah yang dimulai dari Kab/Kota</p> <p>e. Tidak adanya sinergitas antar induk cabang olahraga dan pelaku keolahragaan;</p> <p>f. Kurangnya pembinaan olahraga prestasi yang berkesinambungan; serta</p> <p>g. Kurangnya kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional di daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya Laporaan dan Dokumen dalam hal pemetaan potensi olahraga dalam tingkat Kab/Kota. - Belum adanya regulasi yang mengatur olahraga dan pelaku keolahragaan. - Masih kurangnya kompetensi pelatih dan atlit . - Belum terpenuhinya standarisasi prasarana dan sarana di Daerah |
| 3 | <p>Masih Lemahnya Kapasitas Kepramukaan</p> | <p>a. Gerakan Pramuka belum mampu menarik minat kaum muda milenial untuk aktif;</p> | <p>- Masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan menarik minat kaum muda.</p> |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|--|--|
| | | b. Belum adanya data terpadu kepramukaan di Provinsi Sulawesi Tengah | - Belum maksimalnya rencana program / kegiatan antar pengambil kebijakan (stakeholder) pada Dispora Prov. Sulteng dan Kwartir Daerah (Kwarda), serta Kwartir Cabang (Kwarcab) Kab/Kota |

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals).

Sesuai Dengan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu ***“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang maju dan berkelanjutan 2025-2029”***, memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (Empat) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sehat,cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan Penyediaan Lapangan Kerja;
2. Mewujudkan masyarakat Bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sector;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan lokal;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

a) Tantangan:

- Belum /masih kurangnya gagasan yang dituangkan dalam bentuk konsep dan informasi.
- Luasnya wilayah pembinaan pemuda.
- Penanganan Pemuda belum tertangani secara optimal
- Tingkat pengguna
- Masih kurangnya atlet berprestasi
- Kurangnya fasilitas olahraga indoor milik pemerintah dan swasta
- Kurangnya wadah bagi pemuda dalam hal melatih dan membentuk pemuda mandiri.

b) Peluang :

- ✓ Luasan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
- ✓ Banyak jumlah organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat yang Parsial
- ✓ Banyaknya jumlah usia muda /pelajar
- ✓ Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- ✓ Adanya Organisasi Olahraga, KONI, KORMI Provinsi Sulawesi Tengah

5. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan

Dalam penyusunan Program Prioritas Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus didukung dengan data yang akurat seperti data jumlah cabang olahraga (Cabor), jumlah atlit, jumlah wasit, pelatih, yang bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi dan juga sampai dengan jumlah wirausaha baru dimasing-masing wilayah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan Hasil analisis kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel T-C 31 sebagai berikut:

Tabel T-C 31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

| NO | Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|---------------------------------|--------|--------------------------|---|--------------------------|--|--------|--------------------------|------|-----------------|
| | Bidang Urusan/Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output | Lokasi | Indikator Outcome/ Output | Target | Pagu Indikatorif (Rp) | Bidang Urusan/Program/Outc ome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Output | Lokasi | Indikator Outcome/ Output | Target | Pagu Indikatorif (Rp) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| 1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 34.026.375.396 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 16.382.152.162, 79 | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 34.026.375.396 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 16.382.152.162, 79 | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS | | | | 20.355.665.848 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai) | 75.60 | 7.672.172.162,79 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------|----------------|--|--|--|------------------|---|
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai) | 60 % | 20.355.665.848 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | | | 7.672.172.162,79 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 551.257.877 | Nilai Sakip Perangkat Daerah | | <i>Persentase/Pre dikat Nilai AKU</i> | 75 | 0 |
| | Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | | | <i>Persentase capaian IKU Perangkat Daerah</i> | | Persentase | 96 | 0 |
| | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | | | | Nilai Kematangan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah | | <i>Nilai Capaian Data Statistik Sektoral</i> | 4 | 0 |
| | Tertelaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | 1 | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | | | Tertelaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data) | 4 | 0 |
| | Nilai Sakip Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | | Nilai Sakip Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) | 6 | 0 |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-------------|---|--|---|---|--|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 6 | 301.257.877 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 0 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 0 | |
| | | | | | Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 0 | |
| | | | | | Persentase capaian IKU Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen) | 1 | 0 | |
| | | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah | 25 data | 100.000.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik sek- toral daerah | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|
| | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik sektoral daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 150.000.000 | Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | 0 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah | 86 Persen | 12.530.607.971 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | 0 | |
| | | | | | Persentase Capaian Realisasi APBD Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut | 1 | | |
| | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 2 | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 641 Dokumen | 150.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen Verifikasi Penatausahaan | 2 | 0 | |
| | | | | | Tertaksunanya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | 0 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--------------------|---|---|----|------------------|----------|
| | | | | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | 2 | | |
| | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 1 | | |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 94 | | |
| | | | | | Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) | 94 | 6.495.471.215,79 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 84 orang/bulan | 12.360.607.971 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 94 | | |
| | | | | | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) | 94 | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah | 86 Persen | 120.000.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|--|
| | | | | | | Percentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang | 2 | 0 | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan | 4 | | |
| | | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan | 4 | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 2 | 0 | |
| | | | | | | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | | 0 | |
| | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 | |
| | | | | | | Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang | 4 | 0 | |
| | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 0 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|--------------------|---|--|--|-----|---|
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 92 Person | 150,000,000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 0 |
| | | | | | Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan | 165 | 0 |
| | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian | | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | |
| | | | | | Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi | 165 | 0 |
| | | | | | Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | 1 | 0 |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 Dokumen | 150,000,000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | 1 | 0 |
| | | | | | Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 70 | 0 |
| | | | | | Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|--|---|----|--------------------|--|
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 0 | |
| | | | | Tertindakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi | 70 | 0,00 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | 92 | 600.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 199.372.147 | |
| | | | | Nilai capaian pelaksanaan pembangunan Zona | Jumlah Laporan Penyelene | | 0 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Lap | 400.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | | | |
| | | | | Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | |
| | | | | Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | | | |
| | | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|---|-----------|--|--|
| | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan | | Jumlah Unit Sarana | 8 | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | | | | | Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM | | Jumlah Laporan Penyediaan | 12 | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan | | | |
| | | | | | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan | | | |
| | | | | | 1.000,000,000 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang | 12 | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air | | | |
| | | | | | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
| | | | | | 1.000,000,000 | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | |
| | | | | | 86 Persen | | | | | |
| | | | | | 1.000,000,000 | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |
| | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 40 Unit | 550.000.000 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin | 132 | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat Partisipasi pemuda dalam keg.ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan | <0.55 % 1.69 % 62% | 2.727.188.123 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Rasio Wirasaha Pemuda (Rasio) | 0.43 | | |
| | | | | | Meningkatnya daya saing kepemudaan | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|----------------------|---|---|---|--|--|
| | Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Persentase Kemandirian Pemuda | 100 persen | 2.520.000.000 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | | | | |
| | | | | | Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepeloporan | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis | 1 | | |
| | | | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh | 3 | | |
| | Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sector pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi Strategis lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan di provinsi | 1 Dokumen | 600.000.000 | Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sector penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi RAD/RAD Tingkat Provinsi | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|-------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | Jumlah Pemuda pelopor Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam | 30 Orang | 320,000,000 | Tertaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi (Dokumen) | 1 | | | | | |
| | | manambahannya | | | Tertaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|---|--|---|-------|--|--|
| | | | | | <p>Persentase Pemuda yang dbina di Bidang Kepemimpinan</p> | | <p>Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Persentase)</p> | 47,78 | | |
| | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Provinsi</p> | <p>Persentase Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan</p> | 20 Persen | 400,000,000 | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi</p> | | | 47,78 | | |
| | | | | | <p>Persentase Pemuda yang dbina di Bidang Kewirausahaan</p> | | <p>Persentase efektivitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Persentase)</p> | 1000 | | |
| | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirusaha Muda Tingkat Provinsi</p> | <p>Jumlah Wirusaha Muda Tingkat Provinsi yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</p> | 20 Orang | 700,000,000 | <p>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirusaha Muda Provinsi</p> | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|------|--|---------------|
| | | | | | Meningkatnya Peran Organisasi Pemuda | Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi) (%) | 62,5 | | |
| | | | | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | | | | |
| | | | | | Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan | 100 | | |
| | | | | | - Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi | | | | |
| | | | | | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan | Persentase organisasi kepemudaan | 100 | | |
| | | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | | |
| | | | | | 10.106.893.993,00 | | | | 8.709.980.000 |
| | | | | | Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Persentase medali yang diperoleh dalam | 60 | | |
| | | | | | 54,99 | | | | |
| | | | | | 376.140.852 | | | | |
| | | | | | Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|------------------|---|--|-------|----------------|--|
| | | Meningkatnya prestasi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan | 54.99 | 699.999.776 | | persentase induk olahraga yang berpartisipasi | 12,11 | | |
| | | Persentase Atlet yang berprestasi | 47.49 | 70.000.000 | | | | | |
| | | Persentase Pelatih Olahraga unggulan yang bersertifikat | | | | | | | |
| | | Persentase Wasit Olahraga Unggulan yang Bersertifikat | | | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Persentase Jumlah Atlet yang dibina dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga | 100 % | 1.100.000.000,00 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | 109.980.000,00 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------------------------|---|---|---------|----------------|--|
| | Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Olahraga melalui perencanaan, Pengadaan, pemanfaatan, pemilihan, dan pengawasan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan | 26 Unit | 1,100,000,000,00 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan | 30 Unit | 109,980,000,00 | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | 100% | 4,608,419,933,00 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi | 135 orang | 2,500,000,000 | Persentase olahraga unggulan yang beprestasi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan) | 1 | | |
| | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Olahraga Multi Event dan Single Event | 1 Keg | 1,700,000,000 | - Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan | 3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|---|--|----|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi | 1 | 408,419,933 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga (Orang) | 3 | | | |
| | | | | | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Kegiatan) | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | 3.398,474,060 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | | | | | |
| | | | | | Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota | Jumlah Atlet Daerah yang Diseliksi (Orang) | 40 | 8.600.000.000 | | |
| | | | | | | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu provinsi (Dokumentasi) | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---------------|---|--|--|--|----|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | Seleksi Atlet Daerah | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi | 8 Cabor | 75,000,000 | Seleksi Atlet Daerah | | | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibidik dan Diberikan | 30 | | |
| | | | | | Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu | 4 | | |
| | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | 1 Pelatdah | 2.698.474,060 | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi | Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | 25 Dok | 700,000,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|---|---|----|--|--|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Dokumen | 700,000,000 | Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi (Dokumen) | | | |
| | | | | - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan | | | | |
| | | | | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan | Jumlah Olahragawan Atlet | 30 | | |
| Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | 1,000,000,000 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | | | | |
| Standarisasi Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan | 8 Cabor | 500,000,000 | Persentase Tenaga Keolahragaan yang bersertifikat Nasional | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi | 1 | | |
| Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | 55 Organisasi Olahraga | 500,000,000 | Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | Pembinaan dan Pengembangan Olahragana Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | | | | |
| | | | | | | Persentase sarana dan prasarana Olahragana dalam kondisi baik | Jumlah prasarana olahragana di tingkat provinsi yang tersedia (Unit) | 1 | | |
| | | | | | | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahragana melalui perencanaan, pengadaan, | | | | |
| | | | | | | Tertaksananya penyediaan prasarana olahragana melalui perencanaan, pengadaan, | Jumlah prasarana olahragana di tingkat provinsi yang tersedia (Unit) | 1 | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahragana | | | | |
| | | | | | | Persentase olahragana umnggulan yang beprestasi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan | 4 | | |
| | | | | | | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahragana Tingkat Nasional dan Provinsi | | | | |
| | | | | | | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahragana Tingkat Nasional dan Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahragana Tingkat Nasional dan Provinsi yang | 4 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | 836,627,432 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam | Tingkat Partisipasi Masyarakat at dalam Kepramu | 10.51 | | | | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | 836,627,432 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Pemuda yang dibina dalam organisasi Kepramukaan | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi) | 29 | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya | | | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | | | | | | | | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan disajikan berikut ini:

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|--|---|--------------------|---------|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provins | | | |
| | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provins | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan | 1 Unit | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provins | | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan | 1 Unit | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya / Organisasi | 29 Organisasi | |

Di dalam melaksanakan program pemerintah pada Tahun 2026 yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terbuka salah satunya melalui program pementasan kemiskinan Ekstrim melalui intervensi tabel di bawah ini :

| No | Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja |
|-----|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provins | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda Tingkat Provinsi. | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda Tingkat Provinsi | Jumlah Wirausaha Muda tingkat Provinsi yang difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provins | | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahragayang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi | Terlaksananya Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengaduan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | |
| | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi |
| | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara. |

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tupoksi setiap Organisasi Perangkat Daerah tidak dapat dipisahkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan provinsi. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan adalah bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu memiliki arti bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan sinergi program kepemudaan mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara nasional. Sementara itu, pada sektor keolahragaan, ruang lingkup koordinasi meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga industri, olahraga prestasi, serta pembudayaan olahraga di masyarakat.

Sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Semua urusan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dibagi habis dalam setiap OPD sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Isu-isu strategis yang merupakan fenomena nyata yang wajib dicermati dan diidentifikasi dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan OPD yang melaksanakan urusan bidang Kepemudaan dan olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

1. Bidang Kepemudaan “Untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan peran aktif pemuda”;

2. Bidang Olahraga “Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan”;
3. Bidang Ketenagaan dan Kepramukaan “Mengembangkan mutu tenaga keolahragaan dan kepramukaan daerah dengan memenuhi standarisasi Tenaga Pelatih, Wasit, dan Instruktur di Daerah”; dan
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Standarisasi “Untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga”.

Sasaran :

1. Bidang Kepemudaan “Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan”;
2. Bidang Olahraga “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga”;
3. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan “Meningkatnya mutu tenaga Pelatih yang profesional”; dan
4. Bidang Sarana, Prasarana dan Standarisasi “Meningkatnya pembangunan sarana, prasarana pemuda dan olahraga di daerah yang terstandarisasi”.

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data

yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2025-2029;
2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih "Holistik Integratif" sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga

antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan

8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
 - 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
 - 1) Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional; dan
 - 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nama OPD: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode | Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output | Indikator Outcome/Output | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|------|---|---|--------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (000) | Sum ber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatorif (000) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 16.382.152.162,79 | | | 34.575.888,171 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | 16.382.152.162,79 | | | 34.575.888,171 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 60 % | 7.672.172.162,79 | | 65% | 13.422.400,171 | |
| | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai) | | 75,60 | 7.672.172.162,79 | | 77,10 | 13.422.400,171 | |
| | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Persentase/Pre dikat Nilai AKIP | | 75 | | | 78 | | |
| | Persentase capaian IKU Perangkat Daerah | Persentase | | 96 | | | 97 | | |
| | Nilai Kematangan Statistik Sekoral pada Perangkat Daerah | Nilai Capaian Data Statistik Sekoral | | 4 | | | 4 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 80% | 633.946.558 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----|------------------|--|-----|---|----------------|
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | | | 2 | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | 37.000.000 |
| | Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | 2 | | | 2 | | 37.000.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | 60.000.000 |
| | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 2 | | | 2 | | 60.000.000 |
| | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | 18.000.000 |
| | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) | 1 | | | 1 | | 18.000.000 |
| | Persentase Hasil Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP) BPK dan APIP | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan) | 94 | | | 100 | | 10.378.750.171 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 6.495.471.215,79 | | | | 10.378.750.171 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | | | | | | | 115.000.000 |
| | Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | | | | | 115.000.000 |
| | | Jumlah Laporan Rekonstitusi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | | | | |
| | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | 12.000.000 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|-----|-------------|
| Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) | 2 | | | 2 | 12.000.000 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 91.000.000 |
| Tertaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | | 4 | 91.000.000 |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | 12.000.000 |
| Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | 4 | | | 4 | 12.000.000 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | 146.000.000 |
| Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 165 | | | 165 | 15.000.000 |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | 15.000.000 |
| Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) | 165 | | | 165 | 15.000.000 |
| Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | | | 1 | 30.000.000 |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | 30.000.000 |
| Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) | 1 | | | 1 | 30.000.000 |
| Nilai hasil Survey Implementasi ASN BerAKHLAK | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | 70 | | | 90 | 101.000.000 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | 101.000.000 |
| Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi | 70 | | | 90 | 101.000.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--------------|--|-----|-------------|
| | Peraturan Perundang-Undangan (Orang) | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | 199.372.147 | | | 269.000.000 |
| Nilai capaian pelaksanaan pembangunan Zona Integrias | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | | | 5 | 165.000.000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 139.332.000. | | | 165.000.000 |
| Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | 5 | | | | 5 | 165.000.000 |
| Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 200 | | | | 200 | 22.000.000 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | 22.000.000 |
| Tertelaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 200 | | | | 200 | 22.000.000 |
| Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 200 | | | | 200 | 22.000.000 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | 22.000.000 |
| Tertelaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | 200 | | | | 200 | 22.000.000 |
| Persentase Tindaklanjut Laporan Pengaduan melalui SPAN Lapor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | | | 3 | 60.000.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 60.040.147 | | | 60.000.000 |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | 3 | | | | 3 | 60.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------------|--|-----------|---------------|--|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| Nilai Keputahan Pencetakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SPSE | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 8 | | | 5 | 100.000.000 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | 100.000.000 | |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | | 8 | | | 5 | 100.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 734.466.400 | | | 1.634.500.000 | |
| Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM Terintegrasi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 12 | | | 12 | 800.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 12 | | | 12 | 800.000.000 | |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | | 12 | | | 12 | 800.000.000 | |
| Nilai Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 12 | | | 12 | 834.500.000 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 734.466.400 | | | 834.500.000 | |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | | 12 | | | 12 | 834.500.000 | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 242.862.400 | | | 424.150.000 | |
| Persentase barang milik daerah yang dipelihara | | | 39 | | | 39 | 424.150.000 | |
| | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit) | | | | | | | |
| | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | | 132 | | | 132 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-------------|--|-------------|----------------------|
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | | 1 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 196.952.400 | | | 295.800.000 |
| | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya (Unit) | 39 | | | 39 | 295.800.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | 50.000.000 |
| | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | 132 | | | 132 | 50.000.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 45.910.000 | | | 78.350.000 |
| | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | 1 | | | 1 | 78.350.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | | | | | | 3.451.170.000 |
| | Meningkatnya daya saing kepemudaan | Rasio Wirusaha Pemuda (Rasio) | 0.43 | | | | 2.845.075.500 |
| | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kepemudaan | persentase prasarana pemuda yang dimanfaatkan (%) | 20 | | | | 345.000.000 |
| | | persentase sarana pemuda yang dimanfaatkan (%) | 25 | | | | |
| | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Prosentase kemandirian pemuda | 47,49 % | | | 100% | 1.692.669.991 |
| | Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepeporan | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan | 1 | | | 1 | 477.500.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------|--|--|--|---|--|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | Kepemudaan di provinsi (Dokumen) | | | | | | | |
| | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 3 | | | | 3 | | |
| | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayaran Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayaran Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | | | | | | | | 210.000.000 |
| | Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayaran Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayaran Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayaran Kepemudaan di provinsi (Dokumen) | 1 | | | | 1 | | 210.000.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | | | | | | | | 267.500.000 |
| | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang) | 3 | | | | | | 267.500.000 |
| | Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kepemimpinan | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Persentase) | 47,78 | | | | | | 267.500.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | | | | | | | | 267.500.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|--|--|--|--|---------------|
| | Terlaksunanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi | Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda (Persentase) | 47,78 | | | | | 267.500.000 |
| | Persentase Pemuda yang dibina di Bidang Kewirausahaan | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang) | 3 | | | | | 2.172.500.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi | | | | | | | 2.172.500.000 |
| | Persentase sarana dan prasarana Pemuda dalam kondisi baik | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termantfaatkan (Unit) | | | | | | |
| | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi | | | | | | | |
| | Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termantfaatkan (Unit) | | | | | | |
| | Meningkatnya Peran Organisasi Pemuda | Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi) (%) | | | | | | 261.094.500 |
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase) | | | | | | 261.094.500 |
| | Persentase Pemuda yang dibina dibidang keorganisasian | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase) | | | | | | 261.094.500 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda | | | | | | | 261.094.500 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyediaan Pembinaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis penguahan kemandirian ekonomi pemuda (Persentase) | | | | | | 261.094.500 |
| | Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi | Peningkatan persentase jumlah organisasi pemuda | 26 Unit | | | | 100% | 195.500.000 |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembudayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha | Jumlah Pemuda Kader yang Terasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha | 100% | | | | 20 Org | 80.500.000 |
| | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi | 135 orang | | | | 1 Dok | 115.000.000 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | | 8.709.980.000 | | | | 17.284.118.000 |
| | <i>Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga</i> | <i>Persentase sarana dan prasarana Olahraga dalam kondisi baik</i> | 64,00 | | | | 50,00 | 12.690.230.000 |
| | | <i>Persentase induk olahraga yang berprestasi</i> | 10,53 | | | | 42,11 | 2.620.000.000 |
| | Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana keolahragaan | Persentase sarana olahraga yang memanfaatkan | 60,00 | | | | 65,71 | 1.973.888.000 |
| | | Persentase prasarana olahraga yang memanfaatkan | 85,71 | | | | 85,71 | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan / Unit | 83,33 | | | | 83,33 | 345.000.000 |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia / Unit | 1 Unit | 109.980.000 | | | 1 Unit | 345.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|
| | pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga | | | 75,00 | | | | 75,00 | 4.451.388.000 |
| | Meningkatnya prestasi olahraga unggulan | Persentase olahraga unggulan yang beprestasi | | 25 Dok | | | | | |
| | Tertaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | |
| | Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga / Orang | | 3 Kegiatan | | | | 3 Kegiatan | 2.650.000.000 |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi / Kegiatan | | 1 Kegiatan | | | | 1 Kegiatan | 172.500.000 |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara / Kegiatan | | 4 Kegiatan | | | | 4 Kegiatan | 1.628.888.000 |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Persentase jumlah pembinaan atlet berprestasi | | 100 Persen | 8.600.000.000 | | | 100 Persen | 2.447.500.000 |
| | Meningkatnya Kualitas pelaksanaan pengembangan olahraga | Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pengembangan olahraga yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota | | | | | | | |
| | Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|--|-----------------------|--|--|
| <p><i>Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i></p> | | | | | | | | |
| <p><i>Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi</i></p> | | | | | | | | |
| <p><i>Tertaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi</i></p> | | | | | | | | |
| <p>Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah</p> | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi / Orang | 40 | | 1000 | | 345,000,000 | | |
| <p>Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</p> | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) / Pelatda | 3 Kegiatan | | 4 Kegiatan | | 1,150,000,000 | | |
| <p>Sub Kegiatan Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi</p> | Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi / Dokumen | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 402,500,000 | | |
| <p>Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi</p> | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan / Orang | 30 Atlet | | 30 Atlet | | 550,000,000 | | |
| <p>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</p> | Persentase pembinaan Organisasi / Cabang Olahraga yang dibina | 4.08 | | 4.67 | | 10,040,230,000 | | |
| <p><i>Meningkatnya kualitas Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional.</i></p> | <i>Persentase Tenaga Keolahragaan yang bersertifikat Nasional</i> | | | | | | | |
| <p><i>Meningkatnya Kualitas Wasit Olahraga Unggulan Bersertifikat Nasional</i></p> | <i>Persentase Wasit Olahraga Bersertifikat Nasional</i> | | | | | | | |
| <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait</p> | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan | | | | | 9,867,730,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|--|--|--|--------------|--------------------|--|
| | | Provinsi dengan Lembaga Terkait / Dokumen | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi / Dokumen | 1 | | | | 1 | 172,500,000 | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | | | | | | | 418,200,000 | |
| | Meningkatnya kualitas kepramukaan | Tingkat partisipasi pelajar dalam kepramukaan | 10.51 | | | | 12.35 | | |
| | Pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan | Capaian pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan | 67.00 | | | | | 418,200,000 | |
| | <i>Meningkatnya minat pemuda dalam mengikuti Organisasi Kepemudaan</i> | <i>Persentase Pemuda yang dibina dalam Organisasi Kepramukaan</i> | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya / Organisasi | 29 Organisasi | | | | | 418,200,000 | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi | Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas / Unit | | | | | | | |

**BAB IV
RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang:

- 1) Partisipatif;
- 2) Dari atas (top-down); dan
- 3) Dari bawah (bottom-up).

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder), untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, komitmen dan integritas perencanaan disemua lapisan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka menengah, mengacu pada RPJMD 2025-2029;

2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemerintahan dan pembangunan;
4. Merumuskan Jabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahunan secara lebih "Holistik Integratif" sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks Pembangunan Daerah dan bidang lain, tidak Eksklusif dan Konservatif;
5. Mencermati proporsi-proporsi antar ruang-ruang mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efisien, tidak ada biaya terbuang, kegiatan optimal mengacu pada rambu-rambu pekerjaan sosial. Hal ini sangat perlu disadari, agar karakteristik program-program pemerintahan umum di Sulawesi Tengah jelas dan terjaga;
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas Eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi, perhatian untuk jajaran Legislatif;
7. Sosialisasi, arah, isi, mekanisme rencana program memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan provinsi, kabupaten/kota masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar selaras; dan
8. Memperhatikan rambu-rambu penganggaran sesuai peruntukan sumber APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan), sehingga perpaduan APBD-APBN dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup selain menyusun rencana upaya peningkatan pemerintahan dan pembangunan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan :
 1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi; dan
 2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan :
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
 3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; dan
 4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan :
 1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

BAB V
PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran, beserta indikatornya yang akan dilaksanakan. Penyusunan Rencana Kerja ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi melalui perencanaan yang baik yang diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Rencana Kerja (RENJA) inilah yang akan dipakai sebagai acuan dasar dalam pengambilan keputusan yang akan ditempuh organisasi secara terencana dan terkoordinasi dengan harmonis. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2026 diharapkan dapat memacu pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan melibatkan stakeholder sehingga nanti nyatakan tercipta sasaran dan hasil kinerja yang dapat di pertanggung jawabkan.

Diharapkan pada Tahun 2026 sesuai dengan program/kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 akan ada penambahan dana yang dapat meningkatkan dan memajukan Pemuda dan Olahraga di Sulawesi Tengah. Keterbatasan anggaran ditetapkan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah belum bisa mengakomodir seluruh kegiatan yang akan mencapai visi misi Dinas dan tujuan pembangunan daerah.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini telah diupayakan sebaik-baiknya, kami tetap mengharap masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

Palu, 7 Oktober 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19730321 199311 1 001